



Buletin Triwulanan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI

Dari Redaksi

Selamat Jalan Teman,

Kabar dari RSUD Anutapura Palu pada hari Rabu sore, tanggal 14 Juli 2010 tersebut terasa begitu mengejutkan dan menyedihkan bagi kami Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Sore itu salah satu keluarga besar kami, Jemmy Sugiono, staf Sub Bagian Umum (Bagian TI), meninggal dunia. Menurut informasi dari rumah sakit, teman kami meninggal pada pukul 16.30 WITA karena sakit radang selaput otak atau meningitis yang menyebabkan kondisi fisiknya drop dan telah dirawat selama 3 minggu di rumah sakit.

Dari rumah sakit, jenazah disemayamkan semalam di Aula Perwakilan dan keesokan harinya sebelum diterbangkan ke Surabaya, diadakan upacara pelepasan yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan. Menurut informasi dari keluarga, jenazah selanjutnya dibawa ke Pasuruan untuk dimakamkan.

Hidup, rejeki, jodoh dan mati seseorang memang misteri Tuhan. Sebagai makhluknya yang lemah kita tidak tahu kapan, dimana serta bagaimana kita akan meninggal dunia. Yang dapat kita persiapkan hanyalah mempersiapkan bekal jika sang maut sewaktu-waktu datang menjemput.

Redaksi Eboni dan keluarga besar Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mengucapkan selamat jalan kepada teman, saudara dan keluarga kami, Jemmy Sugiono. Semoga amal ibadahnya diterima Tuhan dan bagi keluarga yang ditinggalkan dapat ikhlas dan tabah dalam menghadapi cobaan berat ini. Terima kasih atas semua pengabdian dan dedikasimu selama bertugas di Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat jalan teman Tuhan memberkatimu.

- Redaksi -



*Belajarlah dari pengalaman orang lain,
karena anda tidak dapat hidup cukup lama untuk bisa
mendapatkan semua itu dari pengalaman anda sendiri*

- anonim -



Daftar isi

Dari Redaksi.....	1
Tajuk Utama Pengelolaan Keuangan Daerah Menurun.....	1
Kota Palu Tutup Rangkaian Pemeriksaan Semester I TA 2010.....	2
Tren Opini Pemeriksaan LKPD	2
Tindak Lanjut yang Berlarut-larut.....	2
Perwakilan Sulteng "Ngungsi" ke Kantor Sementara.....	3
Komitmen Kebangsaan Semakin Melemah.....	3
Pemeriksaan BPK Menjadi Ahli Kasus Pajak Donggala.....	3
Perwakilan Prov. Sulteng Gelar Diklat Pemeriksaan Kinerja RSUD.....	3
Selamat Ya.....	4
Galeri Foto.....	4

Tajuk utama

LHP atas LKPD TA 2009 Se-Sulawesi Tengah

Pengelolaan Keuangan Daerah Menurun



Palu-Eboni, Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Dadang Gunawan (tengah), menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Sulawesi Tengah kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Prof. (Em) Drs. H. Aminuddin Panalele, M.S., disaksikan Gubernur Sulawesi Tengah, H. B. Paliudja. Penyerahan tersebut dilakukan dalam sidang pleno DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis, 17 Juni 2010. Opini yang diberikan BPK untuk LKPD Provinsi Sulawesi Tengah TA 2009 adalah Disclaimer, menurun dibandingkan TA 2008 yang memperoleh opini WDP.

PALU - Eboni

Pengelolaan keuangan daerah pada 12 (dua belas) entitas pemeriksaan yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran (TA) 2009 mengalami penurunan.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diterbitkan oleh Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI pada Semester I 2010, dari 12 entitas yang diperiksa, hanya empat entitas atau 33,33% yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Donggala.

Apabila dibandingkan dengan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2008, jumlah entitas yang mendapat opini WDP pada TA 2009 mengalami penurunan. Pada TA 2008, dari 11 entitas yang diperiksa (Kabupaten Sigi belum diperiksa karena merupakan kabupaten baru hasil pemekaran-red) lima entitas atau 45,45% mendapatkan opini WDP dan sisanya enam entitas atau 54,55% memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau Disclaimer.

LHP atas LKPD TA 2009 menunjukkan tiga entitas mengalami penurunan kualitas pengelolaan keuangan daerah yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Toli-Toli. Tiga entitas tersebut pada TA 2009 ini memperoleh opini Disclaimer, padahal pada TA 2007 dan 2008 ketiganya mendapatkan opini WDP. Kenaikan kualitas pengelolaan keuangan hanya diperoleh dua entitas yaitu Kabupaten Poso dan Kabupaten Donggala. Bagi Kabupaten Donggala kenaikan status dari Disclaimer menjadi WDP merupakan suatu lonjakan yang positif, karena sejak TA 2006, 2007 dan 2008 selalu mendapatkan opini Disclaimer.

Penurunan kualitas pengelolaan keuangan daerah tersebut merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Pemda, DPRD maupun BPK. Sebagai lembaga tinggi negara yang bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara/daerah, BPK berkewajiban untuk selalu mendorong Pemda agar terus melakukan perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. (kur)

Kota Palu Tutup Rangkaian Pemeriksaan Semester I TA 2010



Berbeda dengan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan terinci atas LKPD TA 2009 dilaksanakan tidak serempak. Tim pemeriksa diberangkatkan sehari setelah entitas menyerahkan LK kepada BPK untuk diperiksa.

Sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 56, menyatakan bahwa laporan keuangan disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Namun, dari 12 entitas yang diperiksa, 6 entitas terlambat menyampaikan laporan keuangan kepada BPK untuk diperiksa yaitu, Kab. Banggai Kepulauan (5 April), Kab. Tojo Una-Una, Kab. Sigi (12 April), Provinsi Sulawesi Tengah (14 April), Kab. Parigi Moutong (19 April) dan Kota Palu (28 April).

Pemeriksaan atas LKPD TA 2009 berlangsung selama 30 hari di lapangan dan 30 hari untuk proses penyusunan laporan. Sebelum laporan diterbitkan, entitas diberikan pemaparan (expose) atas temuan pemeriksaan dan diberikan jangka waktu untuk menyampaikan tanggapan atas temuan pemeriksaan.

Berdasarkan LHP, hanya 4 entitas yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sedangkan 8 entitas yang lain mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau *Disclaimer*. Apabila dibandingkan dengan hasil TA 2008, terdapat penurunan kualitas pengelolaan keuangan. Pada TA 2008 terdapat 5 entitas mendapatkan opini WDP dan 6 entitas TMP. (kur)



(foto atas Pelaksanaan *Expos* atau Pemaparan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Poso TA 2009 di Aula Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Senin, 10 Mei 2010.

(foto bawah) Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Palu TA 2009 oleh Kepala Perwakilan, (Dadang Gunawan) kepada Ketua DPRD Kota Palu, H. M. Sidik Ponulele, di Aula Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat, 25 Juni 2010.

Pemeriksaan atas LKPD TA 2009 dimulai dengan pemeriksaan pendahuluan atas LKPD dan pemantauan atas penyelesaian kerugian negara atau daerah pada tanggal 31 Januari 2010 sampai dengan 2 Maret 2010 pada 11 entitas pemeriksaan se-Sulawesi Tengah kecuali Kabupaten Sigi.

Fokus pemeriksaan pendahuluan tersebut antara lain akun kas pada BUD dan Bendahara Penerimaan serta Bendahara Pengeluaran SKPD sehingga pada saat pemeriksaan terinci, saldo kas sudah dikunci dan tidak bergerak kembali. Selain kas, pemeriksaan pendahuluan juga dilakukan atas akun investasi dan kewajiban.

PALU - Eboni

Rangkaian pemeriksaan semester pertama TA 2010 yaitu pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah TA 2009 ditutup dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kota Palu. LHP tersebut diserahkan Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Dadang Gunawan, kepada Ketua DPRD Kota Palu, H. M. Sidik Ponulele, di Aula Perwakilan, 25 Juni 2010.

Opini Pemeriksaan BPK RI

Atas LKPD TA 2009 Se-Sulawesi Tengah

No	Entitas Pemeriksaan	Opini LKPD TA		Tren Opini
		2008	2009	
1	Kabupaten Toli-Toli	WDP	TMP	Turun
2	Kabupaten Donggala	TMP	WDP	Naik
3	Kabupaten Poso	TMP	WDP	Naik
4	Kabupaten Morowali	TMP	TMP	Tetap
5	Kabupaten Banggai	WDP	WDP	Tetap
6	Kabupaten Buol	TMP	TMP	Tetap
7	Kabupaten Banggai Kepulauan	TMP	TMP	Tetap
8	Kabupaten Tojo Una-Una	WDP	WDP	Tetap
9	Kabupaten Sigi*	-	TMP	-
10	Provinsi Sulawesi Tengah	WDP	TMP	Turun
11	Kabupaten Parigi Moutong	WDP	TMP	Turun
12	Kota Palu	TMP	TMP	Tetap

Keterangan :

1. TMP = Tidak Menyatakan Pendapat atau Disclaimer
2. WDP = Wajar Dengan Pengecualian
3. * = Kab. Sigi merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kab. Donggala pada tahun 2008 sehingga Laporan Keuangan mulai diperiksa BPK pada TA 2009.

Tindak Lanjut HP dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Berlarut-larut

PALU - Eboni

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah TA 2009 yang dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan atas LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota pada Semester I TA 2010 menunjukkan bahwa rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan BPK belum semuanya ditindaklanjuti.

Selain itu penyelesaian kasus kerugian negara/daerah pun berlarut-larut antara lain disebabkan Majelis TP/TGR belum berfungsi secara optimal dan kesadaran pihak yang terlibat untuk segera menyetor atau mengembalikan ke Kas Negara/Daerah masih sangat rendah.

Menurut laporan hasil pemantauan BPK, terdapat kerugian daerah sudah berumur lebih dari 2 tahun bahkan sampai 18 tahun belum ditindaklanjuti.

Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 26 ayat (2), menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00.

Pemerintah sebenarnya telah memberi kemudahan dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan negara/daerah. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1997, Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 14 ayat (2), menyatakan bahwa dalam keadaan terpaksa Bendaharawan/pegawai yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditanda-tanganinya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup. (kur)



Perwakilan Sulteng “Ngungsi” Ke Kantor Sementara



PALU - Eboni

Kepala Perwakilan (Kalan) Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI, Dadang Gunawan, Kamis, 15 April, berkunjung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu untuk bertemu dengan Kepala KPP Pratama Palu, Dwi Ismurdiono, S.H., M.Si.

Kunjungan Kalan ini bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus menindaklanjuti surat dari Sekjen BPK RI tentang peminjaman gedung KPP PBB Palu yang terletak di Jalan Moh. Yamin No.35 Palu untuk dijadikan kantor sementara Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI.

Dalam waktu dekat ini, Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk sementara akan mengungsi atau pindah ke gedung KPP PBB Palu yang berjarak kurang lebih 250 meter dari kantor yang saat ini ditempati. Rencananya gedung kantor yang sekarang ditempati akan dihapuskan dan dibangun gedung kantor perwakilan yang baru.

Sejak diresmikan pada tanggal 16 November 2007 oleh mantan Wakil Ketua BPK RI, (Alm.) H. Abdullah Zaini sampai saat ini, Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah masih menempati gedung milik

Dirjen Perkebunan dengan status pinjam pakai. Berdasarkan kesepakatan antara BPK RI, Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan, gedung yang semula dimiliki oleh Kementerian Pertanian dan dipakai sebagai kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI dialihstatuskan menjadi milik BPK RI dan akan digunakan sebagai lokasi pembangunan kantor perwakilan yang baru.

Sehubungan dengan alih status tersebut, pada tanggal 24 Maret 2010, bertempat di Aula Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan rapat koordinasi tentang proses penyerahan alih guna status tanah dan bangunan antara BPK RI, Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan. Hasilnya pada tanggal 26 Maret 2010 Kementerian Keuangan menyetujui alih guna status tanah dan bangunan.

Saat ini ditengah kesibukan menjalankan tugas pemeriksaan dan tugas administrasi pendukung penunjang, para pegawai di Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah juga sibuk berbenah untuk mengungsi atau pindah selama kurang lebih dua tahun di kantor sementara. (kur)

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-102 Komitmen Kebangsaan Perlu Ditingkatkan

PALU - Eboni

Dalam kehidupan sehari-hari, komitmen terhadap rasa kebangsaan Indonesia semakin melemah, selain itu etika kehidupan berbangsa dan bernegara juga memudar. Hal tersebut terungkap pada pidato Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Menkominfo), Tifatul Sembiring dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-102.

Pidato Menkominfo tersebut dibacakan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Dadang Gunawan, saat menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang diselenggarakan di halaman Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis, 20 Mei 2010.

Pada peringatan Kebangkitan Nasional ke-102, yang mengambil tema “*Dengan Semangat Kebangkitan Nasional Kita Tingkatkan Ketahanan Masyarakat dalam Kerangka NKRI*”, Menkominfo menekankan masalah tentang pembangunan karakter bangsa. Menurutnya warga berkarakter kuatlah yang mampu melanjutkan serta meneruskan cita-cita menjadikan bangsa ini bangsa berkarakter, mempunyai identitas dan berjiwa diri. (kur)



Pemeriksa BPK Menjadi Ahli Kasus Pajak Donggala



PALU - Eboni

Kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hasil pemungutan pajak ke kas negara pada Dinas Permukiman dan Penataan Wilayah (Kintawil) Kabupaten Donggala TA 2008 memasuki masa persidangan.

Kepala Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan, Dogom Harahap, M.M., Ak., didampingi Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas, Agustinus Triyonjati, S.H., M.Hum., pada tanggal 17 Mei 2010, didengar keterangannya sebagai ahli di persidangan.

Dalam kedudukannya sebagai ahli, ketua majelis hakim meminta Dogom untuk menjelaskan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh BPK akibat kasus penggelapan pajak ini.

Sebelumnya Dogom juga telah memberikan keterangan sebagai ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Donggala, pada tanggal 6 Januari 2010. (kur)

Perwakilan Prov. Sulteng Gelar Diklat Pemeriksaan Kinerja RSUD

PALU - Eboni

Sub Bagian SDM Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 21 s.d. 25 Juni 2010, menyelenggarakan Diklat Pemeriksaan Kinerja RSUD. Diklat yang dibuka oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Dadang Gunawan, tersebut bertempat di Aula Perwakilan dan diikuti oleh seluruh pemeriksa yang bertugas di Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Hadir sebagai pemateri antara lain dari RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah, RSUD Anutapura Palu, Kepala Seksi Sulteng IA, IIA dan IIB Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Menurut Kepala Perwakilan, Diklat Pemeriksaan Kinerja RSUD antara lain bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta tentang konsep dan prinsip pelayanan kesehatan RSUD, baik dalam segi keandalan sistem pelayanan maupun mutu pelayanan. Selain itu diklat pemeriksaan kinerja RSUD merupakan bekal bagi peserta yang dalam waktu dekat akan ditugaskan melakukan pemeriksaan.

Materi yang disampaikan dalam diklat ini antara lain struktur organisasi, manajemen dan tupoksi RSUD, Sistem Pengendalian Intern RSUD dan Pemeriksaan Operasional RSUD. (kur)





Galeri Foto Perwakilan

Snap Shot Galeri Perwakilan

1. Pelepasan Bpk. Maknun Fuad dan Arjuna Sakir pindah tempat tugas (1 April 2010)
2. Kunjungan Kepala Perwakilan ke Kantor Pujak Pratama Palu dalam rangka peminjaman kantor perwakilan (15 April 2010)
3. Kunjungan Binbangkum ke Perwakilan Prov. Sulteng dalam rangka pemantauan tindak lanjut pemeriksaan (15 April 2010)
4. Penyerahan berita acara penyerahan LKPD Kabupaten Banggai Kepulauan kepada BPK RI untuk diperiksa (5 April 2010)
5. Ketua Tim LKPD Provinsi Sulawesi Tengah sedang memeriksa kelengkapan berkas yang diserahkan ke BPK untuk diperiksa (14 April 2010)

6. Penandatanganan berita acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI antara Kepala Perwakilan dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli (21 Mei 2010)
- 7-10. Penyerahan LHP BPK kepada kabupaten yang mendapatkan opini WDP masing-masing Kab. Donggala, Kab. Poso, Kab. Banggai (27 Mei 2010) dan Kab. Tojo Una-Una (11 Juni 2010)
- 11-15. Penyerahan LHP BPK kepada kabupaten yang mendapatkan opini Disclaimer yaitu, Kab. Morowali, Kab. Buol (27 Mei), Kab. Bangkep (4 Juni), Kab. Sigi (11 Juni) dan Kab. Parimo (18 Juni)
16. Suasana penyerahan LHP BPK RI kepada Kab./Kota
- 17-18. Renovasi persiapan kantor perwakilan baru

Redaksi Eboni mengucapkan Selamat Kepada



M. Sholichuddin dan Yuyun O.
(Staf Seksi Sulteng IIB)
Azka Reza Achmad
(10 April 2010)

Sri Kasembadan dan Arifah F. U.
(Bendahara Pengeluaran)
Muh. Ghiffari Taqiy
(24 April 2010)



Titis Imanda dan R. Visnu B. S.
(Staf Sub Bagian Keuangan)
Kindra Enry Nararya
(28 April 2010)

Ramli Rahim dan Kartika Amrin
(Sub Bagian Hukum dan Humas)
Ahmad Alif Putra Perdana
(21 Juni 2010)



Atas kelahiran putra pertamanya
Semoga menjadi anak yang sholeh berbakti
pada orang tua, bangsa dan agama
- amin -



"panjang umur. sukses. sehat dan semoga apa yang dicita-citakan tercapai. amin"

Suhatman Adjis	3 Juli
Yuliade Saputra	7 Juli
Sri Kasembadan	9 Juli
Yati Nasyrah Paturusi	15 Juli
Imran	21 Juli
Arisman Tamaapa	22 Juli
Ida Fatmawati	23 Juli
Zulfianti	23 Juli
Wikan Ardhi Tama	29 Juli
Iwan Santosa	29 Juli
M. Sholichuddin	31 Juli
Sigit Istiyanto	4 Agustus
Arafiq	5 Agustus
Yusuf Efendi Kusuma	9 Agustus
Hary Setiawan	25 Agustus
Marsono	26 Agustus
Dhenny Septiady	1 September
Suryadi Wawan Kurniawan	8 September
M. Syazili	14 September
Kortina Gultom	29 September



Redaksi Eboni mengucapkan Selamat Menempuh Hidup Baru Kepada

Ida Fatmawati, S. I. (staf Seksi Sulteng I.B) dengan **Robby Sanjaya**
dan
Putu Wirya Nagiantha, S. I., Ak. (staf Seksi Sulteng II.A) dengan **Silvia Mahayudha**

Eboni Penanggungjawab Ruslan Redaktur Agus (agt) Penyunting/Editor Rony Kurniawan (kur) Redaktur Pelaksana Wawan (wwn) Desain Grafis dan Fotografer Hendra (hd) dan Rony Setyo (kur) Sekretariat Wikan (wkn)

Alamat Redaksi Sub Bagian Hukum dan Humas Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI; Jln. Prof. Moh. Yamin No.84 Palu Sulawesi Tengah 94121; Telp. (0451) 486622 Ext. 118; Fax (0451) 486633; e-mail : hukumhumas.sulteng@yahoo.com

Redaksi menerima kiriman berita, artikel atau informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dan kegiatan ke-BPK-an lainnya. Bagi tulisan yang dimuat akan mendapatkan souvenir cantik. Untuk kritik, saran dan segala uneg-uneg tentang permasalahan yang ada di Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, silakan email atau sampaikan ke redaksi Eboni.